

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung arti bahwa negara kita berdasarkan atas hukum yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai warga negara yang baik, selayaknya kita mengetahui dan mempelajari hukum nasional yang berasaskan UUD 1945. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.¹

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh manaatinya menjadi penyebab terdapatnya keseimbangan setiap hubungan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

¹ Admin. 2010. *Pengertian Hukum Dasar Indonesia*, <http://pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia> diakses tanggal 11 Oktober 2017, pukul 16.04

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dan masyarakat².

Berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia pada hukum perdata memiliki bagian-bagian yakni hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan dan hukum waris. Pada jaman Hindia Belanda, dibidang hukum perdata waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat (1) IS penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu ³: Golongan Eropa, pasal 163 (2) terdiri dari: a. Semua warga negara Belanda, b. Semua yang tidak disebut pada nomor 1 diatas, yang berasal dari Eropa, c. semua warga negara Jepang, d. semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk ke dalam nomor a dan b ditandahi asalnya mempunyai hukum keluarga yang dalam asasnya bersamaan dengan hukum keluarga Eropa. Anak nomor b dan c yang dilahirkan di Indonesia secara sah atau menurut UU yang diakui dan turunan mereka selanjutnya, e. Keturunan mereka yang tersebut diatas. Golongan timur asing berdasarkan pasal 163 (4) adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam golongan bumi putera dan golongan Eropa yaitu orang-orang India, Pakistan, Arab, Cina dan sebagainya. Golongan bumi putera (Indonesia asli) berdasarkan pasal 163 (3) adalah orang-orang Indonesia asli yang turun temurun menjadi penghuni dan bangsa Indonesia termasuk kedalam golongan bumi putera adalah: Mereka yang termasuk pribumi yang tidak pindah ke golongan lain, Mereka yang tadinya termasuk ke dalam

² C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta hal 36

³ Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan hal 1-2

golongan lain, tapi telah meleburkan diri ke dalam golongan bumi putera.⁴ Keberadaan hukum adat di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum. Keberadaannya saat ini masih diakui sebagai sumber dasar hukum yang sah. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa undang-undang yang menjelaskan dasar berlakunya hukum adat di Indonesia, diantaranya : a) Ketentuan UUD NRI 1945, b) Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, c) UU No. 5 Tahun 1960 , d) UU No. 41 Tahun 1999, e) UU No. 4 Tahun 2004, f) UU No. 16 Tahun 1985.⁵ Namun dalam UUD 1945 Pasal 18A dan 18B disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Tidak sedikit pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18A dan 18B UUD 1945 tersebut bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia yaitu pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁶

Dalam hukum perdata, golongan bumi putera memiliki keterkaitan pada hukum kekeluargaan dimana pada hukum kekeluargaan itu terdapat hukum perkawinan dan hukum waris. Pada hukum kekeluargaan tidak dapat lepas dari perkawinan, karena perkawinan antara dua insan manusia lah yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga sendiri adalah sekelompok orang yang menghuni rumah tertentu dan disatukan berdasarkan ikatan perkawinan, hubungan

⁴ Soetandjo Wingjosebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta:

Rajawali Press, hlm.56

⁵ Soerojo Wignjodiporo, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 133

⁶ Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung, Nusa Media, Hlm. 90.

darah atau proses adopsi. Selanjutnya, akan mengalami kematian dimana setelah meninggalnya manusia tersebut adakalanya meninggalkan sesuatu hal yang bersifat kebendaan, yang selanjutnya disebut dengan waris dan diatur dalam hukum kewarisan dalam hukum adat.⁷

Pada hukum adat itu sendiri, terdapat sistem kekerabatan yang selalu berkaitan pada sistem kekeluargaan yang akan berdampak pada sistem keturunannya. Pada faktanya, sistem kekerabatan yang ada di Indonesia memiliki tiga sistem yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental/bilateral yang berlaku masing-masing.⁸

Pada sistem kekerabatan *Patrilineal*, yaitu adalah suatu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui pihak Bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan. Sistem *Matrilineal*, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang

⁷ Simanjuntak, P.N.H, *Op.cit* hal. 11

⁸ Hazairin. 1974, *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta. Tinta Emas. hal. 9

laki-laki atau seorang perempuan sebagai moyangnya. Sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Ketiga sistem tersebut di atas adalah sistem pewarisannya yang masih cukup kuat bertahan terutama di daerah pedesaan, sedangkan perkembangan di kota-kota besar pada saat ini nampaknya sudah mengarah ke sistem parental. Adakalanya sistem keturunan yang satu dan yang lain disebabkan karena perkawinan dapat berlaku bentuk campuran⁹.

Dalam sistem patrilineal seorang anak laki-laki memiliki peran penting sebagai penerus keturunan dalam sistem kekerabatan, sehingga dalam satu keluarga saat mereka tidak dapat memiliki keturunan seorang anak laki-laki maka mereka akan melakukan pengangkatan anak karena di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Peristiwa hukum yang dapat ditarik yaitu ada pewarisan dari si ayah. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali. Contohnya pengangkatan anak di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki) . Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana). masyarakat Adat Bali dalam proses pengangkatan anak hanya dengan cara mengadakan upacara adat “pemerasan” atau “widi widhana” dengan dipimpin oleh pendeta dan disaksikan para tetua adat, baru kemudian untuk

⁹I.G.N. Sugangga, 1988, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang: Bumi Aksara hlm 11.

kepastian hukum minta surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa telah terjadi pengangkatan anak menurut Hukum Adat.¹⁰

Pada sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal dimana anak perempuan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan anak laki-laki sebagai penerus keturunan kekerabatan sehingga jika terdapat keluarga yang tidak memiliki keturunan anak perempuan maka mereka akan mengangkat anak perempuan. Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Peristiwa hukum yang dapat ditarik yaitu ada warisan dari sang ibu ke anak perempuannya. Susunan sistem kekerabatan Matrilineal berlaku pada masyarakat minangkabau.¹¹

Sedangkan pada sistem bilateral/parental tidak mempermasalahkan gender untuk sistem kekerabatannya. Hanya apabila dalam keluarga tidak memiliki anak, maka dapat dilakukannya pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunannya. Pertalian hukum semacam ini, terdapat pada masyarakat Jawa,

¹⁰ Edy Kurniawan, 2015, *Pengertian Pengangkatan Anak*, <http://www.berandahukum.com> diakses tanggal 11 Oktober 21:26

¹¹ I.G.N. Sugangga, *Op.cit* hal. 26

Sulawesi, Aceh, dan Riau. Jadi peristiwa hukum yang dapat ditarik dari system kekerabatan parental yaitu pewarisan dari si ayah atau dari si ibu.¹²

Jadi secara keseluruhan akibat hukum terhadap pengangkatan anak disini hanya dibatasi tentang hak waris-mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat dan sebaliknya. Sebagai telah diuraikan di atas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pengangkatan anak masih beragam sehingga membawa akibat yang berbeda pula dalam hal hubungan hukum terutama dalam persoalan hak mewarisi.¹³

Hukum waris adalah merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris, pada pasal 830 KUHPerdara pewarisan itu terjadi dan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan setelah terjadi kematian maka timbul lah yang dinamakan pewaris, harta waris serta ahli waris. Ahli waris pada hukum waris perdata, Pasal 832 KUHPerdara menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terdiri dari : Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, contohnya apabila suami adalah sebagai orang yang meninggal disebut sebagai pewaris, sedangkan harta waris yakni kebendaan yang ditinggalkannya, serta istri yang disebut juga janda dan anak-anak nya yang disebut sebagai ahli waris. Dalam hukum waris terdapat hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat.¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wirjono, Projodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Sumur, hal 12.

Pada hukum waris adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁵ Keturunan adalah hal yang sangat penting sebagai penerus generasi dan penerus kepemilikan dari kebendaan yang dimiliki oleh keluarganya. Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.¹⁶

Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu sebagai berikut : a) Anak laki-laki. Semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka. b) Anak angkat Anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian. c) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung Apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris. d) Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu. Apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya. e) Persekutuan adat Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.¹⁷

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7

¹⁶ F. Satriyo Wicaksono, 2011 *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, hal 7

¹⁷ *Ibid* hal 9-10

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka).¹⁸

Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, sebagai berikut : a) Anak laki-laki dan anak perempuan. b) Orang tua apabila tidak ada anak. c) Saudara-saudara apabila tidak ada orang tua. d) Apabila tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa. e) Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya.¹⁹

Pada sistem kekerabatan parental/bilateral anak angkat berhak atas dua sumber warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya karena hubungan dengan orang tua kandungnya tidak terputus, namun harta yang didapat dari orangtua angkat hanyalah sebatas harta pencaharian. Pada sistem parental/bilateral ini terdapat keunikan pada beberapa wilayah di Jawa yang menganggap anak angkat sepenuhnya seperti anak kandung dalam sistem kekeluargaannya, sehingga hak kewarisannya pun diberikan sepenuhnya kepada angkat angkat tersebut karna sejak pengangkatannya, anak angkat tersebut telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya seperti pada Suku Madura dan Suku Adat Osing di Banyuwangi.

20

¹⁸Asri Thaher. 2006, *Sistem Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya*. Fakultas Hukum. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Eko Budianto, 2012, *Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi*, Fakultas Hukum Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember

Suku Osing adalah salah satu suku yang berada di paling timur Jawa Timur yaitu Banyuwangi yang menganut sistem kekerabatan parental dengan ciri anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris. Suku Osing menempati kurang lebih setengah dari wilayah Kabupaten Banyuwangi.²¹

Pewarisan dalam hukum adat berbeda dengan pewarisan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan hukum waris Islam yang pewarisannya barulah terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan/atau setelah pewaris meninggal dunia. Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan tentu mengharapkan bahwa harta warisan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh ahli waris dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa di antara ahli waris seringkali timbul perselisihan, terutama setelah pewaris meninggal dunia. Hal tersebut juga dialami oleh beberapa masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.²²

Pola kekerabatan masyarakat Osing di Banyuwangi adalah bilateral yang memperhitungkan kekerabatan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tradisi masyarakat Osing dalam penentuan lokasi rumah adalah di depan rumah orang tua. Rumah anak akan diletakkan di lahan paling depan atau paling dekat dengan jalan utama dan orang tua akan mengalah mendapatkan lahan yang paling belakang atau paling jauh dari jalan utama. Namun ini hanya berlaku untuk satu

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

keturunan saja. Dengan demikian lahan hunian bagi orang Osing ibarat lahan kesinambungan antara dirinya dengan generasi berikutnya.²³

Penulis akan memberikan gambaran mengenai sistem pewarisan hak janda dan anak angkat masyarakat Osing dalam hukum adat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pada umumnya masyarakat suku Osing Desa Kemiren memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa. Hal ini nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu.²⁴

Aturan mengenai pewarisan dalam masyarakat suku Osing memiliki perbedaan khususnya mengenai hak janda dan anak angkatnya. Contohnya pada janda, apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal ini biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, yang jumlah bagiannya tergantung pada pembagian yang dilakukan oleh pancer. Serta pada kasus pewarisan untuk anak angkat yang kedudukannya sama dengan anak kandung nya, serta pembagian warisan yang sama rata dengan anak kandung pewaris.²⁵

²³ Ridha Andreas Dwiyanoro, 2011, *Analisis Yuridis Tentang Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Osing Di Banyuwangi Dalam Kaitannya Dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Universitas Jember.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Pewarisan dalam hukum adat berbeda dengan pewarisan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan hukum waris Islam yang pewarisannya baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan/atau setelah pewaris meninggal dunia. Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan tentu mengharapkan bahwa harta warisan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh ahli waris dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa di antara ahli waris seringkali timbul perselisihan, terutama setelah pewaris meninggal dunia. Hal tersebut juga dialami oleh beberapa masyarakat Osing di desa, Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.²⁶

Timbulnya kriteria hak waris janda yang bisa atau tidak bisa mendapatkan warisan dari sistematika pembagaan waris janda serta bagian warisan untuk anak angkat di masyarakat osing desa kemiren itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai ‘PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA DAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT OSING (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)’.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana sistem pembagian waris untuk janda dan anak angkat menurut hukum adat Osing masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

²⁶ *Ibid*

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian waris untuk janda dan anak angkat menurut hukum adat Osing masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sistem pembagian waris untuk janda dan anak angkat pada masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian jika terjadi sengketa waris untuk janda dan anak angkat pada masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas pemahaman keilmuan mengenai hukum waris adat yang masih berkembang dan dipertahankan.
 - b. Sebagai tambahan bahan referensi atau sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Mengetahui keberagaman sistem hukum waris yang ada di Indonesia, khususnya di Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi.

- b. Memberikan informasi mengenai sistem pembagian waris dan penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat osing Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sebagai bahan kajian dan kritik serta saran untuk peneliti dalam rangka menambah pengetahuan khususnya tentang hukum waris adat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk membantu masyarakat Osing untuk referensi pemecahan masalah pembagian waris janda dan anak angkat masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan mengenai pembagian waris bagi janda dan anak angkat pada masyarakat Osing di desa Kemiren kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis akan gejala hukum yang timbul, kemudian

²⁷ Soerjono Soekamto.1998.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali ,hlm 33

hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai hukum waris adat ini terletak di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keadaan masyarakatnya yang mampu melestarikan dan mempertahankan budaya, tradisi dan adat istiadat khususnya mengenai hukum waris adat. Bahkan Desa Kemiren terkenal dengan sebutan “Desa Wisata Adat Osing” karena sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli suku Osing.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Hasil penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa hasil tanya jawab langsung yang diperoleh dari responden di Desa Kemiren yaitu dengan Aparat desa, tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat setempat yang selama ini menggunakan sistem pewarisan adat Osing.

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung dari data primer yaitu melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau hasil penelitian yang berwujud laporan yang sesuai dan relevan dengan hukum kewarisan adat Osing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data dan informasi terkait dengan hukum waris adat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, maka perlu melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa masyarakat yang dijadikan informan yang selama ini terlibat dan menggunakan sistem pewarisan adat osing, yaitu:

Aparat desa : Eko Suwilin 46 tahun

Kepala adat : Suhaimi 54 tahun

Beberapa masyarakat Osing : Serat 57 tahun, Hasan 38 tahun

Orang tua yang mengangkat anak : Ibu Hodiayah

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data berdasarkan buku arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya dari informasi yang berasal dari data-data monografi desa Kemiren.

5. Metode Analisa Deskriptif

Proses pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu proses editing yang merupakan tahap awal dari sistem pengolahan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi data yang akan mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Setelah proses klasifikasi selesai maka kemudian dilakukan proses verifikasi data untuk dilakukan pengecekan ulang untuk memudahkan proses analisa data. Dari proses verifikasi tersebut dilakukan analisa data untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai situasi atau kejadian serta aturan-aturan yang berlaku terkait dengan sistem pembagian waris adat, serta berusaha memecahkan masalah dan mengkaji beberapa data yang sudah diperoleh. Tahap akhir dari pengolahan data ini adalah proses penulisan kesimpulan, dari kesimpulan ini hasil penelitian diharapkan dapat difahami dan dapat dideskripsikan dengan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penulisan hasil penelitian ini dibuat sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami mulai dari gambaran atau pengertian awal sampai dengan pembahasan mengenai hukum waris pada masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Bab I. mengemukakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II. merupakan kajian pustaka yang memuat tentang bahan-bahan referensi yang akan digunakan dalam proses penelitian. Tujuan penulisan kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai dasar teori atau pijakan bagi peneliti

dalam melakukan penelitian. Pada bab ini pula diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III. penjelasan dalam bab ini berisi tentang gambaran obyektif penelitian, baik mengenai kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan dan juga berisi pemaparan data mengenai pola pembagian waris menurut hukum adat osing serta sistem penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa waris dan kemudian menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara obyektif mengenai pola pembagian waris yang terjadi di masyarakat osing Desa Kemiren Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi beserta penyelesaian sengketa waris. Bab ini merupakan bab inti dari penulisan hasil penelitian dari hukum waris adat yang akan dibahas.

Bab IV. berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian, mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran untuk berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.